

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam menangani korban bencana tanah longsor belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan mobilisasi sumber daya, di mana Bapena PPNI belum mengadakan pelatihan secara mandiri bahkan pelatihan dan simulasi bencana di Bapena PPNI belum terkoordinir dengan baik. Hal ini dapat dinilai jika Bapena PPNI belum memiliki kesiapan yang matang dalam mempersiapkan suatu badan dengan tidak melaksanakan agenda atau rencananya untuk mewujudkan pelatihan dan simulasi secara mandiri. Walaupun memang terhambatnya pelaksanaan ini juga disertai oleh adanya proposal kegiatan yang belum disetujuinya oleh pusat sehingga Bapena PPNI tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana secara mandiri. Selain itu, terdapat kendala lain dalam pemenuhan sumber daya kesehatan mulai dari personil yang tidak bisa *stand by* di tempat karena mendapat panggilan tugas dari Dinas Kesehatan atau tempat bekerjanya, maupun peralatan medis yang belum lengkap ketersediaanya karena tempatnya yang belum memadai. Meskipun terdapat kendala di beberapa aspek, akan tetapi Bapena PPNI Kota Semarang telah berusaha mempersiapkan diri dengan melaksanakan berbagai aksi kesiapsiagaan yang dapat membantu menangani korban bencana tanah longsor, di antaranya dengan menyiapkan personel berpengalaman, memiliki struktur organisasi dengan tugas yang terorganisir dengan baik, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, serta

mengalokasikan dana untuk korban bencana dalam bentuk donasi. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Bapena PPNI sejalan dengan teori dan konsep manajemen bencana. Hal ini terbukti melalui serangkaian langkah nyata yang diambil oleh Bapena PPNI, di mana implementasi tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi dan merespons potensi risiko yang timbul akibat bencana tanah longsor.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang terkait pelatihan dan simulasi bencana serta kemampuan mobilisasi sumber daya organisasi, sebagai berikut:

1. Jika proposal pelatihan dan simulasi bencana belum disetujui, Bapena PPNI Kota Semarang dapat memulai dengan kegiatan internal yang lebih sederhana, seperti pelatihan dasar mengenai penanggulangan bencana atau simulasi evakuasi korban, yang bisa dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan relawan atau personil yang sudah memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dengan mengundang narasumber yang berkompeten dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan pelatihan dan simulasi bencana kepada anggota Bapena PPNI Kota Semarang.
2. Bapena PPNI Kota Semarang dapat mengadakan sosialisasi atau *workshop* sebagai alternatif dari praktik pelatihan dan simulasi mengenai

kesiapsiagaan bencana tanah longsor bagi anggota organisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya penanggulangan bencana.

3. Bapena PPNI Kota Semarang dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk membuat fasilitas penyimpanan bersama (*shared storage*) yang dikelola bersama dengan pihak yang memiliki ruang dan kapasitas berlebih beserta alternatif lain dapat dilakukan dengan memanfaatkan penyimpanan peralatan medis di fasilitas mitra dengan jaminan keamanan untuk mengatasi tempat penyimpanan peralatan medis yang tidak memadai.
4. Bapena PPNI Kota Semarang dapat membentuk tim siaga bergilir dengan membuat jadwal piket sistem rotasi sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada orang tertentu. Dalam hal ini identifikasi personil diperlukan pada personil yang sekiranya tidak *double job* untuk menjadi personil siaga jika terdapat personil lain yang bertepatan mendapatkan tugas dan tanggung jawab di lain tempat.
5. Bapena PPNI Kota Semarang harus memiliki alur komando yang jelas dalam menurunkan personil di lapangan, hal ini untuk mengantisipasi timbulnya perintah dua arah yang berbeda yang mengakibatkan perintah organisasi tidak terlaksana dengan baik.